

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN GAMBARAN BPKAD KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur, dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten 38 Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan /tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah. Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten

Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah penting adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonopluwon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan 40 perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

2.1.2 Batas Wilayah

Adapun wilayah administrasi Kota Semarang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa 6°50'LS

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 7°10'LS

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 109°50'BT

Sebelah Timur : Kabupaten Demak 110°35'BT

2.1.3 Klimatologi

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan.

Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

2.1.3 Demografi

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.572.105 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2013 sebesar 0,83 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil yang nyata. Sekitar 71,57 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-

64) th, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 th keatas) pada tahun 2012 sebesar 39,72 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif. Pada kurun waktu 5 tahun (2009-2013), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah terpadat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah.

2.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang besar untuk kemajuan suatu negara. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pun di tentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dengan cara meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan. Apabila sarana dan prasarana tersebut memadai pasti partisipasi masyarakat untuk bersekolah pun juga akan tinggi karena mereka merasakan bahwa pemerintah mendukung masyarakatnya untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin tanpa terkecuali. Oleh karena itu untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat baik laki-laki atau perempuan untuk bersekolah dapat dilihat menggunakan indikator, yaitu : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM). Di Kota Semarang kita dapat melihat bagaimana Angka Partisipasi Sekolah dengan jenjang paling tinggi yaitu jenjang Perguruan Tinggi berdasarkan gender dengan gambar dibawah ini :

Tabel 2.1 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Semarang

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni PT (Persero)		
	2017	2018	2019
Laki-laki	35,12	31,60	36,03
Perempuan	43,80	41,33	36,70
Laki-laki + Perempuan	39,45	36,97	36,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni jenjang Perguruan Tinggi antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki selisih yang cukup jauh. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan yang sama untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin yaitu dalam jenjang Perguruan Tinggi. Angka persentase perempuan dalam gambar tersebut di tahun 2017 sampai tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan angka persentase laki-laki. Dapat kita simpulkan bahwa perempuan di Kota Semarang memiliki tekad untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin dengan melihat persentase di gambar tersebut.

2.1.5 Pemerintahan

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan. Saat ini pemerintah Kota

Semarang sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Yang sangat dapat dirasakan perubahannya yaitu perubahan dalam segi pembangunan kota. Banyak sekali terjadi pembanguann yang membuat Kota Semarang menjadi semakin indah dan pastinya efek dari pembangunan tersebut adalah menarik para pendatang untuk berpariwisata ke Kota Semarang. Kota Semarang sekarang pun tidak kalah dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ditambah lagi banyak terobosan dan inovasi baru yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang agar masyarakat merasa nyaman dan sejahtera. Bahkan kritikan, keluhan dan saran dari masyarakat Semarang pun cepat direspon oleh pemerintah yang artinya pemerintah dan rakyatnya memiliki komunikasi yang cukup baik sehingga memperkecil gesekan antara pemerintah dan rakyatnya.

Pemerintah Kota Semarang menjalankan roda pemerintahannya tentu saja tidak sendiri. Mereka dibantu oleh pegawai-pegawai yang bekerja di Pemerintahan Kota Semarang. Pegawai Pemerintahan Kota Semarang sendiri disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. ASN sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia BKPP Kota Semarang jumlah ASN di Kota Semarang yang terdaftar bekerja dalam 51 Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang berjumlah 10.000 orang dengan jumlah 9.288 orang PNS dan 118 orang PPPK. Dari jumlah keseluruhan ASN di Kota Semarang yaitu 10.000 pegawai baik PNS ataupun PPPK sendiri pun memiliki pegawai laki-laki maupun perempuan karena di zaman

sekarang suatu pekerjaan tidak lagi memandang gender. Semua sudah sadar akan tidak adanya perbedaan peran gender dalam pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah Pegawai Negeri sipil di Kota semarang menurut jabatan dan jenis kelamin seperti gambar dibawah ini, yaitu :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Fungsional Tertentu	1.458	1.592	3.951	4.207	5.409	5.799
Fungsional Umum/Staf	1.687	1.838	1.089	1.122	2.776	2.96
Struktural	884	1039	697	807	1.581	1.846
Eselon V	0	0	0	0	0	0
Eselon IV	727	852	638	736	1.365	1.588
Eselon III	126	153	53	64	179	217
Eselon II	31	34	6	7	37	41
Eselon I	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4.029	4.469	5.737	6.136	9.766	10.605

Sumber : Dinas Kepegawaian Kota Semarang

Dalam gambar tersebut perempuan ataupun laki-laki menempati berbagai jabatan yang ada dalam OPD Kota Semarang. Dari jabatan tertinggi sampai yang terendah terdapat peran perempuan dalam membangun pemerintahan. Bahkan jumlah PNS perempuan pada tahun 2019 dan 2020 lebih banyak daripada jumlah PNS laki-laki. Kita ambil contoh dalam Jabatan Eselon II.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disetiap daerah pun harus disusun dengan keadilan seperti pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun tahun 2014. Pengertian keadilan itu sendiri yaitu adil dalam prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Dalam gender sendiri perlu ditekankan bahwa perlu adanya keadilan agar isu-isu seperti tingkat

kekerasan pada perempuan yang tinggi, kualitas hidup perempuan anak miskin yang rentan serta persoalan infrastruktur untuk memadai kepentingan perempuan dan anak yang belum sesuai dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi di suatu daerah maupun negara. Salah satu cara agar tidak terjadi ketimpangan gender adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya perempuan. Sumber daya manusia di Kota Semarang yang berkualitas itu artinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Semarang sudah baik. IPM merupakan indeks yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan panjang usia dan hidup sehat, standar hidup yang layak serta pengetahuan. Salah satu ukuran keberhasilan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukkan perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang

Kota Semarang	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2017	2018	2019
Kota Semarang	95,69	95,82	95,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Nilai optimum dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 100. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang tahun 2017 yaitu 95,69, di tahun 2018 yaitu 95,82 dan di tahun 2019 yaitu 95,55. Itu artinya IPG Kota Semarang termasuk tinggi walaupun terjadi sedikit penurunan di tahun 2019. Melihat angka IPG yang tinggi bahkan hampir menyentuh angka 100, perjuangan Kota Semarang hampir mencapai kesetaraan. Kesetaraan ini artinya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Itulah mengapa digambar 2.2 jumlah PNS di Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin tidak terjadi ketimpangan. Karena IPG di Kota Semarang sangat tinggi dan hampir menyentuh nilai optimum IPG.

2.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang

Visi dan Misi dari BPKAD Kota Semarang sesuai dengan Visi Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 itu sendiri yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal berdasarkan peraturan Walikota Semarang No.88 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD) karena BPKAD sendiri merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang

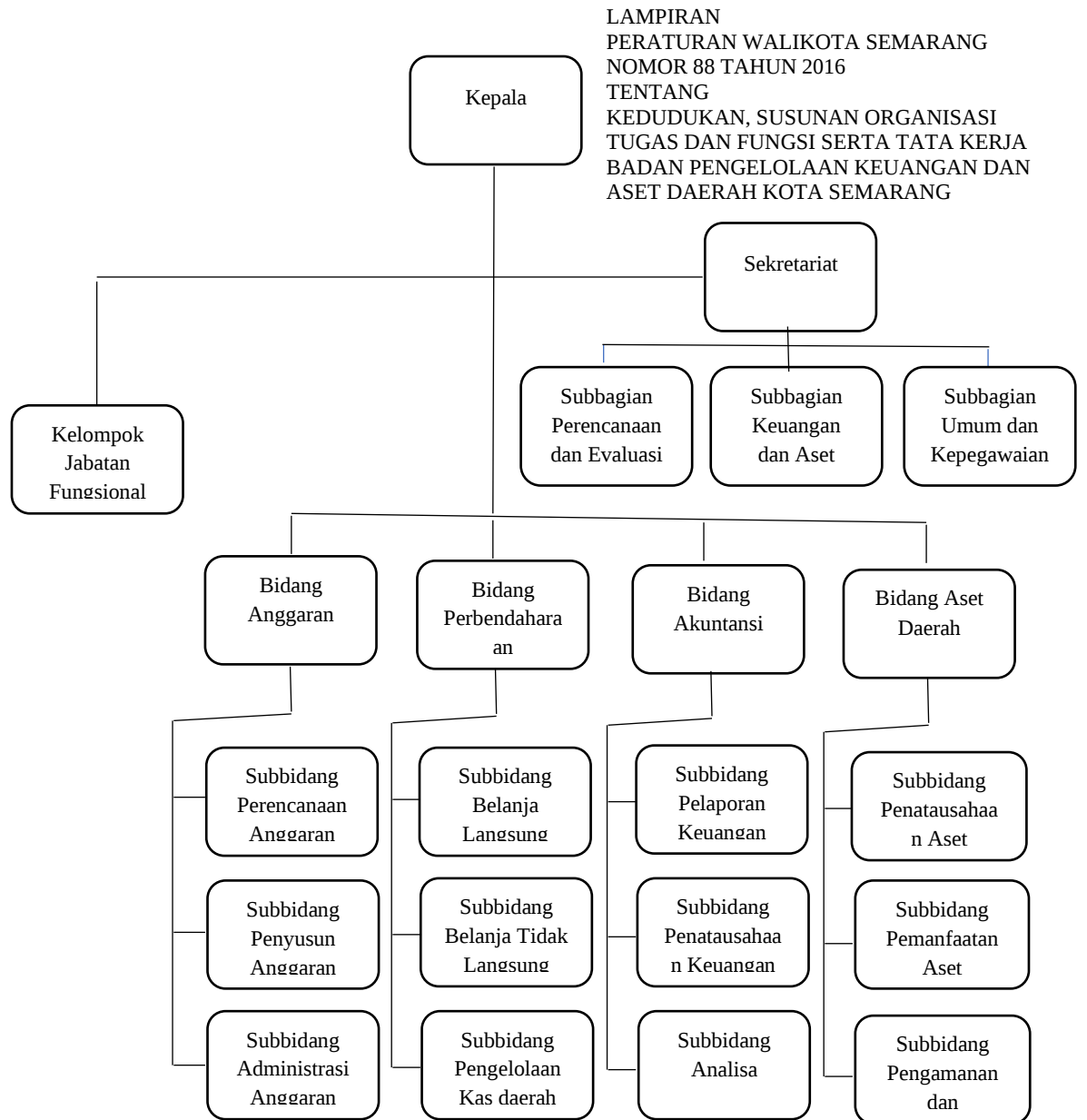
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota Semarang No.88 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (BPKAD) yaitu :

1. Perumusan kebijakan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota

3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah
7. Penyelenggaraan kesekretariatan BPKAD
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

Gambar 2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi BPKAD Kota Semarang



Sumber: BPKAD Kota Semarang

Setiap organisasi dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki seorang pemimpin seperti Sekretariat sendiri memiliki seorang pemimpin yaitu Sekretaris yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah. Kepala Bidang Anggaran sendiri memiliki tugas yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Penyusunan Anggaran dan Subbidang Administrasi anggaran. Begitu pula Kepala Bidang Perbendaharaan memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Belanja Langsung, Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah. Sedangkan Kepala Bidang Akuntansi yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Pelaporan Keuangan, Subbidang Penatausahaan Keuangan dan Subbidang Analisa. Dan yang terakhir yaitu Kepala Bidang Aset Daerah yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Penatausahaan Aset, Subbidang Pemanfaatan Aset dan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset.

2.1.4 Profil Ibu Agustin Lusin Dwimawati, S.H, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Semarang

Ibu Agustin Lusin lahir di Kota Semarang tanggal 13 April 1959. Beliau merupakan salah satu perempuan yang berhasil menduduki kursi kepemimpinan di pemerintahan Kota Semarang. Beliau juga merupakan salah satu Pejabat Eselon II perempuan di pemerintahan Kota Semarang. Beliau dilantik menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 oleh Bapak Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Beliau menjabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kurang lebih selama 2 tahun yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2019 karena di akhir tahun 2019 beliau sudah purna dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah digantikan oleh Ibu Endang Sarwiningsih Setyawulan, S.E, M.M, A.k. Ibu Agustin Lusin sebelum menjabat sebagai Kepala di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, beliau menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang dan disaat itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Ibu Dra. Sri Martini, M.M. Ibu Agustin Lusin yang biasa dipanggil oleh pegawai dan rekan kerjanya sebagai Ibu Lusin dikenal sebagai orang yang penyabar dan ramah kepada semua orang. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin perempuan yang tangguh dan baik dalam kepemimpinannya.